

INDEF POLICY BRIEF NO. 06/2026

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Ekonomi Syariah Melemah

Oktober 2026

Citation: Hidayah, N., Purbasari, L.T., Alaika, R., & Nirwasita, R.A. (2026), “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Ekonomi Syariah Melemah”, INDEF Policy Brief, No. 06/2026, INDEF, Jakarta.

Nur Hidayah¹, Lintang Titian Purbasari², Rochmatulloh Alaika³, dan Raditya Akhdan Nirwasita³

¹Kepala, Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF; ²Peneliti, Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF; ³Asisten Peneliti, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ekonomi syariah menunjukkan indikasi melemahnya prioritas dalam agenda kebijakan nasional. Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2027 tidak menyebut ekonomi syariah secara eksplisit, meskipun Asta Cita 3 dan RPJMN 2025–2029 menempatkannya sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Pelemahan ini juga tercermin pada sejumlah indikator. Peringkat Indonesia dalam *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) turun dari posisi ketiga menjadi keempat pada edisi 2025/26 ([DinarStandard, 2026](#)).

Perbankan syariah menghadapi indikasi *growth illusion*: aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga tetap tumbuh, tetapi pangsa pasar terhadap perbankan nasional turun dari 7,72% (Desember 2024) menjadi 7,36% (Juni 2026) ([Kontan, 2025](#); [OJK, 2026](#); [CSED INDEF, 2025](#)). Di pasar modal, IHSG terkoreksi 28,34% hingga 24 Juli 2026 dengan *net sell* asing Rp79,09 triliun ([Investortrust, 2026](#)), setelah Moody’s dan Fitch menurunkan *outlook* peringkat Indonesia menjadi negatif. Sertifikasi halal yang diklaim mencapai 24 juta produk ([MUI Digital, 2026](#)) belum mendorong ekspor, dan penghimpunan zakat nasional baru 13,7% dari potensi Rp327 triliun ([Fortune IDN, 2026](#)).

Rekomendasi kebijakan: (1) mengembalikan ekonomi syariah sebagai agenda pembangunan nasional yang mandiri; (2) mengintegrasikan sertifikasi halal dengan pembiayaan syariah; (3) memperkuat dukungan fiskal, pengawasan, dan transparansi; (4) memperdalam pasar modal dan investasi syariah; serta (5) memperkuat tata kelola Dana Sosial Umat.

Keywords: ekonomi syariah; SGIE; kebijakan afirmatif; growth illusion; industri halal

LATAR BELAKANG

Ekonomi syariah bukan agenda asing bagi pasangan Prabowo–Gibran. Dalam debat cawapres 22 Desember 2023, Gibran menjadikan peringkat SGIE sebagai bahan pertanyaan kepada lawan debat ([JawaPos, 2023](#)). Komitmen itu kemudian dituangkan dalam Asta Cita ketiga, yang menargetkan Indonesia sebagai “pusat ekonomi syariah”, dan RPJMN 2025–2029 (Perpres 12/2025), yang menempatkan ekonomi syariah dalam Prioritas Nasional 2 dengan indikator posisi global. Dengan kata lain, pemerintah sendiri memilih peringkat SGIE sebagai tolok ukur keberhasilannya.

Dua tahun kemudian, tolok ukur itu bergerak lemah. Sektor perbankan syariah, IKNB syariah, pasar modal syariah, industri halal, dan dana sosial umat, berada di kondisi pertumbuhan nominal tampak meyakinkan namun disertai kemunduran struktural pada indikator fundamental. Brief ini menelusuri pergeseran tersebut secara kuantitatif dan merumuskan rekomendasi untuk memperkuat kembali fondasi kelembagaan ekonomi syariah. Pemerintah memang mengambil langkah konkret pada 2025, yakni Bank Emas BSI–Pegadaian, Kementerian Haji dan Umrah, serta penetapan keuangan syariah dan Kawasan Industri Halal sebagai sasaran pembiayaan Danantara. Namun langkah-langkah itu masih berada dalam kerangka hilirisasi, reformasi haji, dan investasi negara secara umum, belum sebagai kebijakan afirmatif yang terintegrasi bagi kelima sektor.

ANALISIS: LIMA BUKTI STAGNASI STRUKTURAL EKONOMI SYARIAH

Kajian ini menggunakan analisis data kebijakan (*desk-based data analysis*) yang menyandingkan data resmi lima sektor ekonomi syariah dari DinarStandard (SGIE 2021/22–2025/26), OJK, Kementerian Perdagangan, BPJPH, BAZNAS, BWI, BPKH, dan LSEG Data & Analytics, dengan membandingkan pertumbuhan nominal terhadap perubahan pangsa pasar, kedalaman struktur, dan posisi kompetitif global.

1. Peringkat SGIE Merosot ke Posisi #4

Indonesia mencatat penurunan peringkat SGIE pertama sejak 2021 pada edisi 2025/26: Malaysia, UEA, Arab Saudi, lalu Indonesia ([DinarStandard, 2026](#); [Fortune IDN, 2026](#)). Keuangan syariah, sektor yang menjadi fokus kebijakan, justru stagnan di peringkat keenam sejak edisi 2023/24. Kepala CSED INDEF mengaitkannya dengan lemahnya integrasi industri halal dan keuangan syariah, terlihat dari UMKM bersertifikat halal yang masih mengandalkan pembiayaan konvensional ([Republika, 2026](#)). Paradoksnya, daya saing lebih kuat pada sektor yang digerakkan konsumen, tetapi lebih lemah pada sektor produktif yang bergantung pada arsitektur dan koordinasi kebijakan negara.

2. Perbankan dan IKNB Syariah: *Growth Illusion* yang Meluas

[CSED INDEF](#) telah memperingatkan risiko *growth illusion* perbankan syariah dalam kajian internal September 2025 (Hidayah et.al, 2025). Data hingga Juni 2026 memperkuat tesis itu: aset, pembiayaan, dan DPK tumbuh dua digit (11,15%, 11,29%, dan 13,01% yoy), tetapi pangsa terhadap perbankan nasional tergerus 36 basis poin dalam 18 bulan, dari 7,72% menjadi 7,36% ([OJK, 2026](#)). Salah satu penyebabnya, perbankan nasional tumbuh lebih cepat dengan dukungan stimulus likuiditas yang tidak proporsional: BSI hanya menerima 5% dari stimulus Rp200 triliun pada 2025, padahal pangsa asetnya 7,69%. Tekanan pada rasio kehati-hatian ikut terlihat: FDR BUS-UUS mencapai 88,35% pada Juli 2026 ([Republika, 2026](#)), NPF gross BUS-UUS naik menjadi 2,27% ([Kontan, 2026](#)), dan segmen BPRS mengalami stres kualitas aset dengan NPF gross 10,87%.

Analisis awal CSED INDEF pada panel 17 sektor (2014–2024) mengindikasikan bahwa ekspansi pembiayaan syariah belum konsisten diterjemahkan menjadi penyerapan tenaga kerja sektoral. Pola serupa terjadi pada IKNB syariah: aset tumbuh CAGR 11,68% per tahun, tetapi pangsa terhadap total aset keuangan syariah tetap di kisaran 6% karena sektor lain tumbuh sama cepat ([OJK, 2025](#)). Takaful, subsektor yang paling dekat dengan fungsi perlindungan

sosial, nyaris tidak bergerak dengan penetrasi di bawah 1% PDB, sementara rasio TWP90 fintech P2P lending syariah melonjak dari 2,33% menjadi 75,36% hanya dalam satu tahun ([Hidayah et al., 2026](#)).

3. Pasar Modal Syariah: Risiko Investasi, Kepercayaan Investor, dan Peran Danantara

Sovereign rating dan risiko investasi. Moody's (5 Februari 2026) dan Fitch (4 Maret 2026) mempertahankan peringkat Indonesia pada level *investment grade* (Baa2/BBB), tetapi mengubah *outlook* menjadi negatif karena kekhawatiran terhadap prediktabilitas dan kredibilitas kebijakan ([Reuters via NST, 2026](#)). Sementara itu, S&P mempertahankan BBB dengan *outlook* stabil ([Kemenko Perekonomian, 2026](#)). Meski peringkat belum turun, *outlook* negatif meningkatkan risiko *downgrade* dan persepsi risiko investor, yang dapat mendorong kenaikan *yield* serta biaya pendanaan pemerintah dan korporasi, termasuk penerbitan sukuk.

Kepercayaan investor dan arus modal. Peringatan MSCI terkait transparansi pasar pada Januari 2026 memicu tekanan pada pasar saham Indonesia ([Reuters via NST, 2026](#)). Hingga 24 Juli 2026, IHSG terkoreksi 28,34% menjadi yang terburuk di ASEAN dengan *net sell* asing Rp79,09 triliun ([Investortrust, 2026](#)). Tekanan juga terjadi pada pasar modal syariah, dengan Indeks Saham Syariah Indonesia terkoreksi 22,3% dalam 13 minggu. Sementara itu, pasar sukuk senilai US\$6,15 miliar masih didominasi penerbitan pemerintah sebesar 77,5%, sedangkan ESG dan *Green Sukuk* baru mencakup 10 dari 88 seri aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah masih bergantung pada instrumen pemerintah dan belum ditopang basis investor swasta yang kuat.

Danantara dan investasi syariah. Porsi instrumen syariah dalam portofolio Danantara disebut masih di bawah 5%, sementara target, alokasi, dan strategi investasi syariah belum ditetapkan secara eksplisit ([Warta Ekonomi, 2025](#)). Informasi resmi juga belum menunjukkan pemisahan portofolio berdasarkan sukuk, saham syariah, industri halal, wakaf produktif, maupun proyek *sharia-compliant*. Karena itu, diperlukan transparansi portofolio dan metodologi klasifikasi untuk mengukur kontribusi Danantara terhadap pengembangan ekonomi syariah nasional. Proyek Kampung Haji di Makkah (Inpres 15/2025) dapat menjadi salah satu peluang strategis. Danantara telah mengakuisisi Novotel Thakher dan 14 bidang lahan seluas 4,4 hektare ([IDN Financials, 2026](#)) dengan target kapasitas sekitar 22.000 jemaah (10% kuota) ([Kontan, 2026](#)), dan nilai investasi hampir Rp100 triliun menurut Ketua Komisi XI ([Bisnis, 2025](#)). Namun, struktur pembiayaan dan keterkaitannya dengan strategi *Islamic investment* Indonesia masih perlu diperjelas.

4. Industri Halal: Sertifikasi Melesat, Integrasi dengan Keuangan Syariah dan Ekspor

Stagnan

Pemerintah paling sering mengklaim lonjakan produk bersertifikat halal, dari sekitar 725 ribu (Juni 2023) ([CNN Indonesia, 2023](#)) menjadi klaim 24 juta produk pada April 2026 ([MUI Digital, 2026](#)). Namun, peningkatan tersebut belum diikuti penguatan kinerja ekspor. Nilai ekspor produk halal menyusut dua tahun berturut-turut, dari US\$42,3 miliar (Januari–Oktober 2023) ([Fortune IDN, 2023](#)) menjadi US\$41,4 miliar pada periode yang sama 2024, setelah sebelumnya juga mengalami kontraksi 18,77% pada 2023. Konsistensi data turut menjadi persoalan: BPJPH menyebut angka 12–13 juta produk hanya sekitar sepekan setelah klaim 24

juta produk ([TIMES Indonesia, 2026](#)). Data kontribusi *halal value chain* terhadap PDB 2025 juga berbeda antarinstansi, yakni 23% versi [KEKSI](#), 27,34% versi [KNEKS](#), dan 27% versi [BPJPH](#), tanpa kejelasan definisi dan cakupan yang seragam. Kesenjangan antara lonjakan sertifikasi dan pelemahan ekspor menunjukkan bahwa sertifikasi halal belum sepenuhnya terintegrasi dengan penguatan pembiayaan, produktivitas, dan daya saing ekspor industri halal.

5. Dana Sosial Umat: Potensi Besar, Intermediasi Formal Rendah

Dari agenda Asta Cita 3, “optimalisasi pemanfaatan dana sosial” adalah komitmen yang paling terukur, namun kesenjangan potensi dan realisasinya masih lebar. Penghimpunan zakat nasional 2025 mencapai Rp44,7 triliun, atau 13,7% dari potensi Rp327 triliun ([Duta.co, 2026](#)). Survei Nasional ZISWAF 2026 (8.360 responden) memperkirakan pengeluaran ZISWAF dan kurban masyarakat Muslim sekitar Rp343,1 triliun per tahun ([Republika, 2026](#)), tetapi hanya sekitar Rp45 triliun yang melewati lembaga formal seperti BAZNAS, LAZ, dan BWI ([Fortune IDN, 2026](#)). Wakaf uang baru terhimpun Rp2,5 triliun dibandingkan potensi Rp180 triliun per tahun, dan hanya 9,3% aset wakaf yang dikelola produktif. Imbal hasil investasi BPKH 2025 sebesar 6,86% ([Bisnis, 2026](#)) dinilai masih di bawah target, dan pada Januari–Mei 2026 kembali di bawah target RKAT 2026 sebesar 7,9% ([Kontan, 2026](#); [Investortrust, 2026](#)). Mobilisasi dana melalui institusi formal masih lemah dan tata kelola zakat, wakaf, dan dana haji masih terfragmentasi.

PELAJARAN DARI MALAYSIA DAN UNI EMIRAT ARAB

Malaysia, yang mempertahankan peringkat pertama SGIE, pernah menghadapi persoalan serupa yaitu belum terintegrasinya sertifikasi halal dengan pembiayaan syariah. Penguatannya dilakukan melalui kerangka kelembagaan yang terkoordinasi: JAKIM berperan sebagai otoritas sertifikasi halal, sedangkan Bank Negara Malaysia bersama Dewan Penasihat Syariah mengawal sektor keuangan syariah berdasarkan *Islamic Financial Services Act* 2013. Pendekatan tersebut turut menopang penetrasi keuangan syariah yang kuat. Pada akhir 2025, pembiayaan syariah mencapai sekitar 44% dari total pembiayaan perbankan Malaysia ([BIX Malaysia, 2026](#)), jauh di atas pangsa perbankan syariah Indonesia sebesar 7,36%. Bank-bank Malaysia juga menguasai sekitar 82% aset perbankan syariah ASEAN ([The Star, 2026](#)).

Uni Emirat Arab, yang naik ke peringkat kedua SGIE dan menyalip Indonesia, memberi preseden yang relevan. Pada Mei 2025, Pemerintah UEA menetapkan strategi nasional yang mengintegrasikan pengembangan keuangan syariah dengan industri halal. Strategi tersebut menargetkan aset perbankan syariah mencapai AED2,56 triliun sukuk domestik lebih dari AED660 miliar pada 2031 ([Kantor Media UEA, 2025](#)), serta peningkatan ekspor halal dari AED74 miliar menjadi AED315 miliar ([WAM, 2025](#)). Pendekatan UEA menunjukkan pentingnya strategi terpadu yang menghubungkan pembiayaan syariah, industri halal, sukuk, dan ekspor dengan target yang terukur—kerangka kebijakan yang hingga kini belum dimiliki Indonesia secara terintegrasi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Lima rekomendasi berikut diarahkan untuk memperkecil kesenjangan antara komitmen **Asta Cita 3 dan RPJMN 2025–2029** dengan capaian aktual ekonomi syariah, sekaligus menjawab faktor-faktor yang menyebabkan penurunan peringkat Indonesia dalam SGIE.

- 1. Mengembalikan ekonomi syariah sebagai agenda pembangunan nasional yang mandiri.** Ekonomi syariah perlu ditegaskan sebagai agenda mandiri dengan target terukur, termasuk pemulihan peringkat SGIE minimal ke posisi tiga besar sebagai indikator kinerja lintas kementerian/lembaga.
- 2. Mengintegrasikan sertifikasi halal dengan pembiayaan syariah.** Sertifikasi halal perlu dihubungkan dengan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, dan pasar ekspor, termasuk melalui insentif pembiayaan syariah bagi UMKM bersertifikat halal.
- 3. Memperkuat dukungan fiskal, pengawasan, dan transparansi.** Dukungan fiskal perlu lebih proporsional terhadap perkembangan industri syariah, disertai penguatan pengawasan BPRS dan fintech P2P syariah serta penyediaan data keuangan syariah yang terintegrasi dan terbuka.
- 4. Memperdalam pasar modal dan investasi syariah.** Konsistensi kebijakan dan stabilitas regulator perlu dijaga, disertai insentif bagi sukuk korporasi dan ESG/*Green Sukuk*. Danantara perlu menetapkan target dan strategi investasi syariah yang transparan, termasuk mengkaji pembiayaan syariah untuk proyek Kampung Haji.
- 5. Memperkuat tata kelola Dana Sosial Umat.** Pengelolaan ZIS-DSKL, wakaf, dan dana haji perlu diperkuat melalui peta jalan terkoordinasi, digitalisasi, serta peningkatan profesionalisme amil dan nazhir melalui sertifikasi kompetensi dan pelaporan kinerja yang transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Frekuensi Teks Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada RAPBN 2027, 14 Agustus 2026 (bahan internal INDEF).
- Bank Indonesia. (2024). Halal value chain sectors maintain positive growth, support national economic growth. https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_263924.aspx
- Bisnis.com. (2024). Nilai ekspor produk halal RI tembus Rp673,9 triliun hingga Oktober 2024. ekonomi.bisnis.com
- Bisnis.com. (2025). Misbakhun: Nilai investasi Kampung Haji Danantara hampir Rp100 triliun. ekonomi.bisnis.com
- Bisnis.com. (2026). Dana haji kelolaan BPKH tembus Rp180,72 triliun. ekonomi.bisnis.com
- BIX Malaysia. (2026). Islamic banking sector set for steady expansion (Fitch, Malaysian Islamic Banks Monitor 2026). bixmalaysia.com
- BPJPH. (2026). Kepala BPJPH: Wajib Halal Harus Jadi Pengungkit Daya Saing Ekosistem Indonesia. <https://bpjph.halal.go.id/read/kepala-bpjph-wajib-halal-harus-jadi-pengungkit-daya-saing-ekosistem-indonesia>
- CNN Indonesia. (2023). 29,2 juta produk belum bersertifikat halal. cnnindonesia.com
- DinarStandard. (2026). State of the Global Islamic Economy Report 2025/26. dinarstandard.com
- Duta.co. (2026). Empat langkah strategis optimalisasi ziswaf (data BAZNAS 2025). duta.co
- Fortune IDN. (2023). BPJPH: 3,4 juta produk Indonesia sudah bersertifikat halal. fortuneidn.com
- Fortune IDN. (2026). Dana umat capai Rp343 triliun, sistem pengelolaan masih jadi persoalan. fortuneidn.com
- Fortune IDN. (2026). Posisi Indonesia melorot di panggung ekonomi Islam dunia. fortuneidn.com
- Hidayah, N., Risza, H., Naja, A.H., Mukhlisin, M., Mahfudz, A.A., Wardhani, N. (2026). Catatan Tengah Tahun Ekonomi Syariah 2026. CSED INDEF. <https://indef.or.id/book/pengembangan-ekosistem-ekonomi-syariah-indonesia-refleksi-tantangan-strategi/>
- Hidayah, N., Purbasari, L.T., Alaika, R. (2025). Stimulus Fiskal & Risiko Growth Illusion Keuangan Syariah. CSED INDEF. <https://indef.or.id/publikasi/stimulus-fiskal-risiko-growth-illusion-keuangan-syariah/>
- IDN Financials. (2026). Danantara akan beli lahan dekat Masjidil Haram untuk Kampung Haji. idnfinancials.com
- Investortrust. (2026). Bangkit dari tantangan 2025, BPKH targetkan dana kelolaan tembus Rp204 triliun di 2026. investortrust.id
- Investortrust. (2026). Net sell saham tembus Rp79 triliun, IHSG jadi bursa terlemah di ASEAN. investortrust.id
- JawaPos. (2023). Apa itu SGIE yang sempat ditanyakan Gibran ke Cak Imin saat debat cawapres. jawapos.com

- Kantor Media UEA. (2025). UAE Cabinet approves UAE Strategy for Islamic Finance and Halal Industry. mediaoffice.ae
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2026). S&P Global Ratings kembali afirmasi peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. ekon.go.id
- Kontan. (2025). Aset perbankan syariah tembus Rp967,3 triliun per Juni 2025. keuangan.kontan.co.id
- Kontan. (2026). Dewas BPKH ungkap sejumlah masalah investasi yang tekan imbal hasil dana haji. nasional.kontan.co.id
- Kontan. (2026). Garap kompleks haji di Makkah, Danantara targetkan tampung 22.000 jemaah. nasional.kontan.co.id
- Kontan. (2026). Kualitas pembiayaan syariah mulai tertekan. insight.kontan.co.id
- LSEG Data & Analytics. (2026). Price Change Monitor, Indonesia Sharia Stocks, dan data pasar sukuk, Juli 2026.
- Metro TV. (2026). Susul bos BEI, Ketua DK OJK Mahendra Siregar mengundurkan diri. metrotvnews.com
- Miftahudin, H. (2026). Sektor halal melejit, ini 5 PR besar pembiayaan syariah nasional. MetroTV News. <https://www.metrotvnews.com/read/N0BC1GYR-sektor-halal-melejit-ini-5-pr-besar-pembiayaan-syariah-nasional>
- MUI Digital. (2026). Dari 64 juta baru 24 juta produk bersertifikat halal, BPJPH ajak akselerasi. mui.or.id
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia September 2025. ojk.go.id
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2026. ojk.go.id
- Republik Indonesia. Asta Cita Prabowo–Gibran (2024); Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025–2029, Prioritas Nasional 2.
- Republika. (2026). INDEF: Integrasi industri halal dan keuangan syariah diperlukan. sharia.republika.co.id
- Republika. (2026). Pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,82 persen pada Juli 2026 (data OJK). sharia.republika.co.id
- Republika. (2026). Survei Indikator: Potensi ziswaf dan kurban di Indonesia capai Rp343 triliun. khazanah.republika.co.id
- Reuters via NST. (2026). Fitch cuts Indonesia credit rating outlook to negative. nst.com.my
- The Star via Asia News Network. (2026). Malaysia leads ASEAN in Islamic finance growth (BNM Annual Report 2025). asianews.network
- TIMES Indonesia. (2026). BPJPH targetkan 24 juta produk bersertifikat halal. timesindonesia.co.id
- WAM. (2025). UAE's Islamic finance, halal industry poised for robust growth. wam.ae
- Warta Ekonomi. (2025). Potensi Danantara sebagai katalis pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia. wartaekonomi.co.id